

ANALISIS SISTEM PUSAT KEWILAYAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nela Agustin Kurnianingsih¹, Verlina Agustine², Lestari P. Winata³

^{1,2,3} Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknologi Infrastruktur Kewilayahan,
Institut Teknologi Sumatera

¹ Email : agustin.kurnianingsih@pwk.itera.ac.id

Diterima (received): 29 Februari 2024

Disetujui (accepted): 12 Maret 2024

ABSTRAK

Beberapa wilayah memiliki kekuatan sentripetal yang berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini membuat wilayah dengan daya saing rendah perlu didukung oleh wilayah yang memiliki kekuatan sentripetal yang baik dalam mengembangkannya. Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di tingkat daerah. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial, Kabupaten ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perlu dilakukan sebuah identifikasi mengenai Sistem Pusat Kewilayahan di Kabupaten Lampung Selatan yang menyesuaikan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pusat kewilayahan di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggabungkan beberapa analisis, yaitu Indeks Pelayanan, analisis Skalogram Guttman, analisis Indeks Sentralitas Marshal, dan analisis Rank Size Penduduk dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Pusat Pelayanan Kabupaten Lampung Selatan berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kalianda, Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung. Hal tersebut disebabkan, karena Kecamatan Kalianda merupakan ibukota dari Kabupaten Lampung Selatan, kemudian untuk Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung merupakan wilayah dengan status sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Kata Kunci: Wilayah, Sistem Pusat Kewilayahan, Pusat Pelayanan

A. PENDAHULUAN

Wilayah merupakan entitas geografis yang memiliki batas tertentu, namun komponennya tetap saling berinteraksi secara fungsional (Taylor, 1879). Konsep wilayah terus berubah dan berkembang seiring dengan waktu (Nakamura, 2013). Hal ini menghasilkan beberapa pengertian yang berbeda akibat proses klasifikasi yang berbeda sebagai akibat proses klasifikasi yang berbeda pula, seperti: uniform

region dan nodal region. Pada prinsipnya wilayah lebih dititikberatkan sebagai suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri keseragaman gejala internal (*internal uniformity*) yang membedakan wilayah yang bersangkutan dari wilayah lainnya. Keseragaman juga akan membentuk pola pertumbuhan dan kecepatan pertumbuhan suatu wilayah (Sruthi Krishnan & Mohammed Firoz, 2020).

Beberapa wilayah mempunyai kekuatan sentripetal yang baik, dan wilayah lainnya kehilangan daya saingnya. Wilayah dengan daya saing yang rendah perlu didukung oleh wilayah yang kuat dalam memberikan sistem pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan penentuan hierarki spasial pada sistem hierarki lokasi terpusat (Nakamura, 2013). Teori lokasi sentral diselidiki secara sistematis oleh Lösch tahun 1944 sehubungan dengan wilayah pasar (Hamilton, 1989). Meskipun teori lokasi sentral membahas berbagai aspek konfigurasi spasial, beberapa faktor tambahan juga perlu dipertimbangkan dalam mengkaji hierarki spasial yang sebenarnya.

Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung, Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di tingkat daerah. Kabupaten ini terletak di wilayah pesisir selatan Lampung, dengan garis pantai yang panjang serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Pulau Jawa dan menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial, Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu elemen kunci dalam pengelolaan dan pengembangan kabupaten adalah Sistem Pusat Kewilayahan (Hall, 2001). Sistem ini melingkupi pusat kebijakan, pengambilan keputusan, serta koordinasi berbagai program pembangunan di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang bagaimana sistem pusat kewilayahan beroperasi di Kabupaten Lampung Selatan sangat penting untuk memahami peran penting pusat kewilayahan dalam mengarahkan pembangunan, mengalokasikan sumber daya, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di seluruh wilayah. Penelitian ini akan menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan Sistem Pusat Kewilayahan di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk peran pusat kewilayahan dalam pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan pengawasan program-program pembangunan. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana sistem ini beroperasi dan bagaimana kontribusi sistem ini terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut PERDA Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, penetapan PKW di Kawasan Perkotaan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan memiliki fungsi utama,

sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat jasa pendukung pariwisata, dan pusat perdagangan dan jasa. Namun, selain difungsikan sebagaimana disebutkan dalam RTRW Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki potensi pertanian. Menurut PERDA Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan. Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian dan perdagangan dan jasa. Dalam tujuan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang kabupaten sebagai pintu gerbang investasi provinsi yang berbasis pada kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial, Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dokumen rencana tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Maka dari itu dari penelitian ini, muncul pertanyaan, **Bagaimana Sistem Pusat Kewilayahan di Kabupaten Lampung Selatan?** Perlu dilakukan sebuah identifikasi mengenai Sistem Pusat Kewilayahan di Kabupaten Lampung Selatan yang menyesuaikan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penentuan sistem pusat pelayanan di Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan analisis pembobotan dengan menggunakan data sekunder. Analisis spasial dilakukan untuk memahami pola, hubungan, dan distribusi geografis dari data atau fenomena dalam konteks keruangan atau ruang geografis. Analisis pembobotan digunakan untuk memberikan bobot atau nilai relatif pada kriteria atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis pembobotan dilakukan dengan memberikan prioritas atau peringkat pada kriteria yang relevan dengan sistem pusat kewilayahan, yaitu aksesibilitas, pemanfaatan, atau tingkat pelayanan pada fasilitas sosial dan fasilitas umum (sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana peribadatan) di Kabupaten Lampung Selatan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan skalogram. Selanjutnya dilakukan juga pemberian peringkat pada data penduduk kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam menentukan Sistem Pusat Kewilayahan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan menggabungkan beberapa analisis, yaitu Indeks Pelayanan, analisis Skalogram Guttman, analisis Indeks Sentralitas Marshal, dan analisis Rank Size Penduduk.

1. Analisis Indeks Pelayanan

Analisis indeks pelayanan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan dari suatu desa dilihat dari keberadaan fasilitas eksisting. Analisis indeks pelayanan dilakukan menggunakan analisis Indeks Sentralitas Marshal, untuk mengukur tingkat kelengkapan dan skala pelayanan dari setiap tiyuh dibanding terhadap wilayah lainnya (Fasa & Revayanti, 2021).

Analisis yang dilakukan pertama adalah membandingkan indeks pelayanan fasilitas, kecamatan mana yang memiliki kelengkapan fasilitas. Kecamatan paling lengkap dan jumlah fasilitas yang banyak akan memiliki peringkat paling tinggi (Utari, 2015). Penentuan nilai indeks dihitung dengan menggunakan rumus:

$$C = t/T$$

Keterangan:

C = Bobot dari atribut fungsional suatu fasilitas

t = nilai sentralitas gabungan dalam hal ini 100

T = jumlah total dari atribut dalam sistem

Untuk mencari range atau interval skor tiap kelas digunakan rumus:

$$Range = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{5}$$

Pembagian peringkat/rank dalam analisis indeks pelayanan fasilitas dibagi kedalam 5 peringkat, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

2. Analisis Skalogram Guttman

Analisis Skalogram Guttman biasanya digunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hirarki atau orde pusat-pusat permukiman (Gaffara et al., 2015). Subjek dalam analisis ini merupakan pusat permukiman (*settlement*). Alat analisis skalogram membahas mengenai fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu daerah sebagai indikator difungsikannya daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan. Pada analisis skalogram ini hanya diberi kode 1 dan 0, yang artinya 1 berarti ada dan 0 berarti tidak ada.

Dalam menentukan jumlah orde menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 \text{ Log } n$$

dengan n adalah jumlah desa. Maka dapat diperoleh hasil perhitungannya:

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 \text{ Log } 19$$

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 (1,27)$$

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 4,19$$

$$\text{Jumlah Orde} = 5,19$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan hasil 5 kelas (orde) pada Kabupaten Lampung Selatan.

3. Analisis Indeks Sentralitas Marshal

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah (Muhammad Imam Z. Bin Umar, Fahrudin Ramly, 2021). Asumsi yang digunakan apabila suatu wilayah memiliki ranking tertinggi maka lokasi atau wilayah tersebut dapat ditetapkan menjadi suatu pusat pertumbuhan (Tuar et al., 2021).

Dalam hal ini analisis Indeks Sentralitas Marshal merupakan lanjutan dari analisis Skalogram Guttman yang hanya diberi kode 1 dan 0, yang artinya 1 berarti ada dan 0 berarti tidak ada. Pembagian peringkat/rank dalam analisis indeks pelayanan fasilitas dibagi kedalam 5 peringkat, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

4. Analisis Rank-Size Penduduk

Setelah melakukan berbagai analisis untuk mencari pusat pelayanan di Kabupaten Lampung Selatan, untuk lebih menguatkan output maka dilakukan analisis berikutnya dengan metode rank size penduduk. Penentuan struktur wilayah dengan menggunakan metode rank size penduduk adalah untuk mengetahui proporsi distribusi aktivitas perkotaan dengan melihat proporsi dan distribusi jumlah penduduk (Sihombing & Utami, 2023). Metode rank size ini membandingkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di setiap kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Pengklasifikasian size penduduk mengacu pada Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960.

Tabel 1. Klasifikasi Jumlah Penduduk

Klasifikasi Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
Sangat Tinggi	>20.000 jiwa
Tinggi	15.001 - 20.000 jiwa
Sedang	10.001 - 15.000 jiwa
Rendah	5.001 - 10.000 jiwa
Sangat Rendah	0 - 5.000 jiwa

Sumber: Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960

Tabel 2. Klasifikasi Kepadatan Penduduk

Klasifikasi Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk
Sangat Padat	>400 jiwa
Padat	251-400 jiwa
Cukup Padat	51- 250 jiwa
Kurang Padat	<50 jiwa

Sumber: Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Indeks Pelayanan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan jumlah dan kelengkapan fasilitas di tiap kecamatan di Lampung Selatan diperoleh hasil pengklasifikasian dimana terdapat 2 kecamatan yang dikategorikan indeks pelayanan sangat tinggi yakni Kecamatan Kalianda dan Bakauheni.

Tabel 3. Analisis Total Skor Indeks Pelayanan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Natar	4	Tinggi
2	Jati Agung	4	Tinggi
3	Tanjung Bintang	3	Sedang
4	Tanjung Sari	2	Rendah
5	Katibung	4	Tinggi
6	Merbau Mataram	2	Rendah
7	Way Sulan	1	Sangat Rendah
8	Sidomulyo	3	Sedang
9	Candipuro	2	Rendah
10	Way Panji	1	Sangat Rendah
11	Kalianda	5	Sangat Tinggi
12	Rajabasa	1	Sangat Rendah
13	Palas	2	Rendah
14	Sragi	1	Sangat Rendah
15	Penengahan	1	Sangat Rendah
16	Ketapang	4	Tinggi
17	Bakauheni	5	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Analisis, 2023

2. Analisis Skalogram Guttman

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan melihat ada tidaknya pusat pertumbuhan berupa ketersediaan fasilitas kota di Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh hasil pengklasifikasian dimana hanya ada satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang diklasifikasikan indeks skalogram sangat tinggi yakni Kecamatan Jati Agung.

Tabel 4. Analisis Total Skor Indeks Skalogram dan Ranking Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1.	Natar	1	Sangat Rendah
2	Jati Agung	5	Sangat Tinggi
3	Tanjung Bintang	3	Sedang
4	Tanjung Sari	1	Sangat Rendah
5	Katibung	3	Sedang
6	Merbau Mataram	2	Rendah
7	Way Sulan	1	Sangat Rendah
8	Sidomulyo	2	Rendah
9	Candipuro	3	Sedang
10	Way Panji	1	Sangat Rendah
11	Kalianda	4	Tinggi

No.	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
12	Rajabasa	1	Sangat Rendah
13	Palas	3	Sedang
14	Sragi	2	Rendah
15	Penengahan	2	Rendah
16	Ketapang	2	Rendah
17	Bakauheni	1	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3. Analisis Indeks Sentralitas Marshal

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan melihat jumlah dan jenis unit pelayanan di Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh hasil pengklasifikasian dimana hanya ada satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang diklasifikasikan indeks marshal sangat tinggi yakni Kecamatan Natar.

Tabel 5. Analisis Total Skor Indeks Sentralitas Marshal Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Natar	5	Sangat Tinggi
2	Jati Agung	4	Tinggi
3	Tanjung Bintang	3	Sedang
4	Tanjung Sari	1	Sangat Rendah
5	Katibung	4	Tinggi
6	Merbau Mataram	2	Rendah
7	Way Sulan	2	Rendah
8	Sidomulyo	3	Sedang
9	Candipuro	4	Tinggi
10	Way Panji	2	Rendah
11	Kalianda	3	Sedang
12	Rajabasa	1	Sangat Rendah
13	Palas	3	Sedang
14	Sragi	2	Rendah
15	Penengahan	1	Sangat Rendah
16	Ketapang	2	Rendah
17	Bakauheni	1	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4. Analisis Rank Size Penduduk

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan melihat proporsi distribusi aktivitas perkotaan dari proporsi dan distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh hasil pengklasifikasian dimana hanya ada satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang diklasifikasikan jumlah penduduk sangat tinggi dan kepadatan penduduk sangat padat yakni Kecamatan Natar.

Tabel 6. Analisis Rank Size Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk	
		2021		2021	
		Skor	Rank	Skor	Rank
1	Natar	5	Sangat Tinggi	4	Sangat Padat
2	Jati Agung	4	Tinggi	3	Padat
3	Tanjung Bintang	3	Sedang	3	Padat
4	Tanjung Sari	1	Sangat Rendah	3	Padat
5	Katibung	2	Rendah	3	Padat
6	Merbau Mataram	2	Rendah	2	Cukup Padat
7	Way Sulan	1	Sangat Rendah	3	Padat
8	Sidomulyo	2	Rendah	3	Padat
9	Candipuro	2	Rendah	3	Padat
10	Way Panji	1	Sangat Rendah	1	Kurang Padat
11	Kalianda	3	Sedang	4	Sangat Padat
12	Rajabasa	1	Sangat Rendah	1	Kurang Padat
13	Palas	1	Sangat Rendah	4	Sangat Padat
14	Sragi	1	Sangat Rendah	1	Kurang Padat
15	Penengahan	2	Rendah	1	Kurang Padat
16	Ketapang	1	Sangat Rendah	2	Cukup Padat
17	Bakauheni	1	Sangat Rendah	1	Kurang Padat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5. Analisis Sistem Pusat Pelayanan

Berdasarkan seluruh analisis mengenai pemilihan pusat pelayan diantaranya, Indeks Pelayanan, Skalogram Guttman, Indeks Sentralitas Marshal dan *Rank Size* Penduduk, kemudian dilakukan penentuan Struktur Internal/orde perkotaan eksisting dengan metode pembobotan/skoring agar dapat ditentukan lokasi yang menjadi pusat pelayanan. Untuk menentukan orde eksisting, hasil penghitungan dengan beberapa metode analisis pusat pelayanan yang telah dilakukan diberi skor dan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai skor total. Kecamatan dengan skor paling kecil memiliki nilai orde paling besar, begitu pun sebaliknya.

Tabel 7. Analisis Penentuan Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Rank Pusat Pelayanan	Rank Skalogram	Rank Sentralitas	Rank Size Penduduk		Total Skor	Orde
					Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk		
1	Natar	4	1	5	5	4	19	Orde I
2	Jati Agung	4	5	4	4	3	20	Orde I
3	Tanjung Bintang	3	3	3	3	3	15	Orde II
4	Tanjung Sari	2	1	1	1	3	8	Orde V
5	Katibung	4	3	4	2	3	16	Orde II
6	Merbau Mataram	2	2	2	2	2	10	Orde IV
7	Way Sulan	1	1	2	1	3	8	Orde V
8	Sidomulyo	3	2	3	2	3	13	Orde III

Nela Agustin Kurnianingsih dan Verlina Agustine, Analisis Sistem Pusat Kewilayahan Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Rank Pusat Pelayanan	Rank Skalogram	Rank Sentralitas	Rank Size Penduduk		Total Skor	Orde
					Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk		
9	Candipuro	2	3	4	2	3	14	Orde III
10	Way Panji	1	1	2	1	1	6	Orde V
11	Kalianda	5	4	3	3	4	19	Orde I
12	Rajabasa	1	1	1	1	1	5	Orde V
13	Palas	2	3	3	1	4	13	Orde III
14	Sragi	1	2	2	1	1	7	Orde V
15	Penengahan	1	2	1	2	1	7	Orde V
16	Ketapang	4	2	2	1	2	11	Orde IV
17	Bakauheni	5	1	1	1	1	9	Orde IV

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis skoring di atas, diketahui bahwa Orde I berada di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung. Hal ini dirasa relevan dengan kondisi peruntukkan tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang menempatkan Kecamatan Kalianda sebagai pusat pemerintahan (ibukota) dari Kabupaten Lampung Selatan. Terkait dengan Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung bisa dikatakan karena adanya pengkajian kedua wilayah sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Kedua kecamatan ini berkembang tidak lain karena lokasi perbatasan dengan Kota Bandarlampung. Fenomena *sprawling* dari aktivitas/kegiatan Kota Bandarlampung menjadikan kedua kecamatan ini bertindak sebagai penyangga bagi aktivitas perkotaan di Kota Bandarlampung. Dengan demikian ketiga kecamatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki orde pusat wilayah terendah, Orde V berada di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Penengahan. Melihat dari peruntukkan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, menjadikan keempat kecamatan ini memang memiliki luasan areal permukiman yang rendah. Hal itu dikarenakan dominasi lahan pertanian dan perkebunan, sehingga angka kependudukan kedua wilayah juga dalam kategori rendah.

D. KESIMPULAN

Dalam menentukan Sistem Pusat Kewilayahan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan menggabungkan beberapa analisis, yaitu Indeks Pelayanan, analisis Skalogram Guttman, analisis Indeks Sentralitas Marshal, dan analisis Rank Size Penduduk. Dari hasil analisis keempat analisis tersebut yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Kabupaten Lampung Selatan berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kalianda, Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung. Hal tersebut disebabkan, karena Kecamatan Kalianda merupakan ibukota dari Kabupaten Lampung Selatan, kemudian untuk Kecamatan Natar dan

Kecamatan Jatiagung merupakan wilayah dengan status sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Sebagai pusat dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Natar, dan Jatiagung memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

- a. Pusat Informasi: Pusat kegiatan wilayah bertindak sebagai sumber informasi yang terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Pusat ini menyediakan data dan informasi tentang proyek-proyek, acara, infrastruktur, dan program-program yang ada di wilayah tersebut.
- b. Koordinasi: Pusat kegiatan wilayah berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi, lembaga, serta masyarakat di wilayah tersebut. Ini melibatkan pembagian tugas, penjadwalan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Pemantauan dan Pengendalian: Pusat kegiatan wilayah bertugas untuk memantau dan mengendalikan berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Hal ini termasuk pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan terhadap lingkungan, serta pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas kegiatan.
- d. Penyediaan Sumber Daya: Pusat kegiatan wilayah membantu dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan di wilayah tersebut. Ini meliputi fasilitas, infrastruktur, dan dukungan lainnya.
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Pusat kegiatan wilayah berfungsi sebagai wadah untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di wilayah tersebut. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, penentuan kebutuhan, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya pusat kegiatan wilayah, diharapkan dapat tercapai koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, pemantauan dan pengendalian yang efektif, serta terwujudnya partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2020). Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2020. Lampung Selatan: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2021). Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2021. Lampung Selatan: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2022). Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2022. Lampung Selatan: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2023). Kabupaten Lampung

- Selatan Dalam Angka Tahun 2023. Lampung Selatan: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2024). Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2024. Lampung Selatan: Badan Pusat Statistik
- Fasa, A. S., & Revayanti, I. (2021). Kajian Penentuan Sistem Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan di Kecamatan Jatinangor. *Geoplanart*, 3(2), 85. <https://doi.org/10.35138/gp.v3i2.347>
- Gaffara, G. R., Fathu, A., & Fatih. (2015). Kajian Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall untuk Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 150–153. <https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/177/144>
- Hall, P. (2001). Urban System in Geography. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 16099–16104. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02590-0>
- Hamilton, B. W. (1989). Market failure in the land of Lösch. *Journal of Urban Economics*, 25(2), 143–155. [https://doi.org/10.1016/0094-1190\(89\)90032-6](https://doi.org/10.1016/0094-1190(89)90032-6)
- Muhammad Imam Z. Bin Umar, Fahrudin Ramly, I. T. M. (2021). Analisis Penentuan Daerah Pusat Pertumbuhan / Pelayanan di Wilayah Kepulauan Maluku (Analysis of the Determination of Growth / Service Center Areas in the Maluku Islands Region). *Jpk*, 5(2), 1–10.
- Nakamura, D. (2013). Spatial Policy for a Competitive Regional System: Economic and Social Infrastructure Elements. *Journal of Urban Management*, 2(1), 103–112. [https://doi.org/10.1016/S2226-5856\(18\)30067-0](https://doi.org/10.1016/S2226-5856(18)30067-0)
- Sihombing, L. A., & Utami, C. F. (2023). Hirarki Dan Distribusi Kota: Penyebaran, Dan Kepadatan Penduduk Serta Implikasinya Terhadap Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), 218–229.
- Sruthi Krishnan, V., & Mohammed Firoz, C. (2020). Regional urban environmental quality assessment and spatial analysis. *Journal of Urban Management*, 9(2), 191–204. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.03.001>
- Taylor, E. G. R. (Eva G. R. (1879). *General and regional geography for students*. London: G. Philip & Son, 1913.
- Tuar, I. G., Sela, R. L. E., & Lakat, R. S. M. (2021). Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Kota Tomohon Berdasarkan Hirarki. *Spasial*, 8(1), 2442–3262.
- Utari, M. E. S. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Di Kota Yogyakarta Tahun 2014. *Jejak*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3856>
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <https://lampungselatankab.bps.go.id/>